

KONSEP EMANSIPASI PADA ESTETIKA POLITIK JACQUES RANCIERE

Oleh:

Tedy Aprilianto

Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada

Email: tedy.apr2003@mail.ugm.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Naskah Masuk : 4 Maret 2025

Naskah Direvisi : 16 Maret 2025

Naskah Disetujui : 10 April 2025

Tersedia Online : 13 April 2025

Keywords:

Concept of Emancipation, Political aesthetics, Jacques Ranciere

Kata Kunci:

Konsep Emansipasi, Estetika Politik, Jacques Ranciere

This is an open access article under the CC BY. SA

Copyright © 2025 by Author. Published by Samsara Publishing House

ABSTRACT

This research explores the concept of emancipation in Jacques Ranciere's political aesthetic thinking. The purpose of writing this research is to explore the genealogy of emancipation thinking that is the forerunner of Ranciere's aesthetics. This research uses the concept of emancipation that is analyzed by interpreting the social order in Ranciere's political aesthetics. The method used in this study is descriptive analysis that uses methodological elements in the form of interpretation, induction and deduction, reflection and idealization, and heuristics. In addition, it presents a critical reading of emancipation in relation to the political world which is reviewed in the framework of political aesthetics.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi adanya konsep emansipasi dalam pemikiran estetika Jacques Ranciere. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk menggali genealogi pemikiran emansipasi yang menjadi cikal bakal dari estetika Ranciere. Penelitian ini menjadikan konsep emansipasi yang dianalisis dengan menginterpretasikan tatanan sosial dalam estetika politik Ranciere. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah, analisis deskriptif yang menggunakan unsur metodis berupa interpretasi, induksi dan deduksi, refleksi dan idealisasi, serta heuristika. Selain itu, menyajikan adanya pembacaan kritis emansipasi dalam kaitanya pada dunia politik yang ditinjau pada kerangka estetika politik.

I. PENDAHULUAN

Jacques Ranciere dikenal sebagai tokoh filsuf Perancis sekaligus murid dari Louis Althusser. Kedekatan Ranciere dengan Althusser mengantarkannya untuk turut aktif dalam proyek intelektual buku *Lire le Capital* (1965). Melalui karya ini Ranciere menyerap beragam pemikiran marxis dari Althusser¹. Ranciere turut menjadi saksi berkembangnya teori apparatus negara sebagai cikal bakal teori ideologi dalam merespon dinamika politik Prancis. Dengan masih mempertahankan tradisi pemikiran Marxis, teori ini beralih secara strukturalis hingga menjadi marxis-strukturalis. Namun, Ranciere menolak teori ideologi dari Althusser

¹ Ayi Hambali dan Rakhmat Hidayat, "Konsep Pedagogi "Emansipasif Menurut Jacques Ranciere", *Jurnal Sosiologi pendidikan humanis*, Volume 5, Nomor 1, 2020, hal 3.

karena dianggap tidak dapat mempertimbangkan perjuangan kelas sebagai elemen yang fundamental².

Teori ideologi khususnya apparatus ideologi negara Althusser tidak sepenuhnya menangkap dinamika perjuangan kelas. Dalam ranah ideologi perjuangan kelas hanya akan menjadi ikatan pada ideologi selayaknya ilusi. Perjuangan kelas ini kedepannya akan menjebak kelas itu sendiri dalam hubungan subjek, ilusi, dan kebenaran³. Ranciere menganggap pemikiran Althusser sama sekali tidak membicarakan tentang kontradiksi. Akibatnya teori ideologi yang digagasnya beralih dari marxisme menuju sosiologi borjuis. Ranciere juga memberikan bukti bahwasanya upaya Althusser untuk membersihkan marxisme dari elemen Hegelian dan humanis justru menjadikan ideologi sebagai sesuatu yang otomatis diproduksi struktur sosial dan tidak cukup menekankan subjek revolusioner⁴.

Pembacaan Ranciere terhadap pemikiran Althusser menekankan ideologi dapat diterima masyarakat melalui apparatus sekolah, gereja, media dan keluarga untuk mereproduksi kondisi produksi kapitalis. Pemikiran Althusser ini individu di interpelasi oleh subjek ideologi secara otomatis, tanpa adanya ruang bagi resistensi yang aktif. Ranciere mengkritik pendekatan Althusser tersebut karena cenderung menghapus dinamika politik secara luas. Selain itu, Ranciere menilai konsep apparatus ideologi negara Althusser mengabaikan bagaimana praktik politik konkrit. Akibatnya pemikiran Althusser dianggap bertentangan dengan semangat perjuangan kelas yang menjadi inti dari marxisme⁵.

Kritik Ranciere terhadap Althusser juga meninjau dari relevansinya pada Gerakan Mei 1968 di Prancis. Pada masa itu gelombang protes besar-besaran terjadi di Prancis dengan melibatkan mahasiswa, buruh, dan berbagai kelompok masyarakat yang menuntut perubahan radikal terhadap struktur sosial dan ekonomi. Namun, Althusser justru hampir tidak menyinggung peristiwa yang terjadi dalam pengembangan teorinya. Ranciere meyakini sudah seharusnya teori ideologi khususnya apparatus ideologi negara dapat berkontribusi. Akan tetapi, teori Althusser hanya menangkap signifikansi perjuangan politik yang spontan saja. Ranciere menganggap teori ideologi Althusser tidak dapat bekerja secara sempurna dan dapat digoyahkan oleh aksi massa. Oleh karena itu, kerangka teori Althusserian sulit untuk menjelaskan gerakan massa yang muncul dan berkembang yang berpotensi menciptakan perubahan revolusioner⁶.

Berangkat dari kritik terhadap Althusser, Ranciere mulai menentukan pemikiran politiknya sendiri. Ranciere menjelaskan politik bukan sekedar tentang pengelolaan pemerintahan atau distribusi kekuasaan. Melainkan sebuah premis yang lebih radikal yang mengaitkan pada tatanan sosial yang mapan pada sistem. Ranciere juga membedakan antara *politic* dan *policy* sebagai proses menumbuhkan emansipasi serta, diskursus pada tatanan sistem hierarkis sosial⁷. Pemikiran emansipasi Ranciere ini menjadi proses subjektivitas politik yang melibatkan penciptaan subjek kolektif dalam menentang ketimpangan. Ranciere berpendapat bahwa tidak ada hierarki sosial yang inheren dan sah. ketimpangan yang di klaim sebagai fakta justru dipertanyakan melalui tindakan emansipasi. Ranciere menegaskan kesetaraan bukan hanya asumsi filosofis tetapi sesuatu yang dapat diverifikasi dalam praktik⁸

² Jacques Rancière, *Althusser's Lesson* Translated by Emiliano Battista, (London: The Continuum International Publishing Group, 2011), hal 129

³ Jacques Rancière, *Althusser's Lesson* Translated by Emiliano Battista, (London: The Continuum International Publishing Group, 2011), hal 132

⁴ Ibid, hal 146

⁵ Ibid, hal 151

⁶ Ibid

⁷ Jacques Ranciere, *On The Shores of Politics* Translated Liz Heron (London: Verso, 2007)

⁸ Matthew Lampert, "Jacques Ranciere and The Politics of Theory", *Journal Cultural Critique*, Vol 106, 2020, hal 6

Pemikiran politik Ranciere menawarkan konsep *dissensus* yang menjadi berfokus merespon adanya tatanan yang sudah mapan. Ranciere menilai politik bukan soal hukum dan konstitusi tetapi, tentang dinamika ruang publik yang dikonfigurasi pada kehendak hal untuk berbicara dan bertindak.⁹ Perbedaan antara *politic* dan *policy* Ranciere lakukan untuk mengatur tatanan sosial berdasarkan peran yang ditentukan. Ranciere meyakini sejatinya politik mampu mengayomi adanya tatanan sosial yang menegaskan keberadaan mereka. Selain itu, Ranciere menekankan bahwa politik sejati terjadi ketika orang-orang dianggap “tidak memiliki suara” menuntut kesetaraan dan menentang tatanan yang ada. Ranciere menolak pandangan bahwa kesetaraan harus dibuktikan secara teoritis sebagai kesatuan prinsip. Sebaliknya, Ranciere berpendapat bahwa kesetaraan harus dapat diasumsikan terlebih dahulu dan dilihat pada implikasinya dalam praktik sosial dan politik.¹⁰

Diskursus emansipasi pada pemikiran Ranciere bukan meletakkan pada tujuan tetapi praduga. Ranciere berpendapat kesetaraan bukan sesuatu yang didistribusikan oleh negara maupun institusi. Melainkan sesuatu yang harus diasumsikan oleh kelas yang bertindak secara politik¹¹. Pemikiran emansipasi Ranciere turut merembet pada pengalaman indrawi manusia yang diorganisasikan secara sosial dan politik. Ranciere menyoroti manusia menggunakan penglihatan, pendengaran, dialog dan tindakan merefleksikan pada tatanan tertentu. Pemikiran politik Ranciere ini melahirkan adanya dimensi estetika sebagai sesuatu yang berbentuk *dissensus* bukan sekadar pada konflik dan gangguan terhadap makna-makna inderawi yang biasa diatur¹².

Relasi antara estetika dan politik Ranciere jelaskan bukan dalam pengertian seni atau keindahan. Melainkan sebagai pengalaman dan persepsi yang dibentuk dalam kehidupan sosial. Estetika ini berhubungan dengan ruang dan waktu yang dikonfigurasi untuk menentukan siapa yang bisa berbicara, siapa yang bisa terlihat, dan siapa yang memiliki peran dalam ranah publik¹³. Pemikiran Ranciere ini juga menunjukkan kegunaan estetika bisa menjadi alat untuk mempertanyakan tatanan politik yang ada. Selain itu, melalui estetika kelas sosial dapat mendistribusikan pengalamannya dalam menuntut hak-hak politik. Pemikiran emansipasi Ranciere dalam konteks estetika politik ini menjadikan seni sebagai artian politik itu sendiri. Argumentasi Ranciere ini turut menjadikan rumusan premis permasalahan estetika politik dalam pemikirannya berada pada identifikasi rezim seni. Menengok keterkaitan estetika dan politik secara radikal tampak bahwa politik itu terstruktur secara estetis. Adanya tatanan sosial yang dominan membuat kedaulatan tatanan penting dalam menentukan tindakan politik dalam masyarakat. Secara epistemologis penerapan estetis memiliki implikasi pada bagaimana politik bekerja melalui rezim dan klasifikasi strata sosial dari keberadaan masalah pihak yang dipinggirkan¹⁴

Estetika politik Ranciere turut memberikan pendapat terkait dengan tindakan simbolik dan peran bahasa dalam pembentukan identitas politik. Pemikiran Ranciere ini merujuk pada konteks historis tentang “Aventine Hill”. Konteks historis ini memberikan rujukan dinamika sosial di era Romawi yang digerakan rakyat jelata (*plebs*) yang menuntut hak dan pengakuan melalui protes atau ketegangan dengan kaum elit (*para patrician*). Pembagian sosial ini merujuk pada pembagian yang dapat dirasakan pada pemisahan *plebs*

⁹ Jaques Ranciere, “*The Aesthetic Dimension: Aesthetics, Politics, Knowledge*”, Journal Critical Inquiry, Vol 36, No.1, 2009, hal 9.

¹⁰ Matthew Lampert, “*Jacques Ranciere and The Politics of Theory*”, Journal Cultural Critique, Vol 106, 2020, hal 17.

¹¹ Todd May, *Contemporary Political Movements and the Thought of Jacques Rancière Equality in Action* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010), hal 11.

¹² Jacques Ranciere, “*The Aesthetic Dimension: Aesthetics, Politics, Knowledge*”, Journal Cultural Inquiry, Vol 36, No. 1, 2009, hal 2

¹³ Jacques Ranciere, “*From Politics to Aesthetics?*”, Journal Paragraph, Vol. 28, No. 1, 2009, hal 14

¹⁴ Martin Suryajaya, *Sejarah Estetika: Era Klasik Sampai Kontemporer* (Jakarta: Gang Kabel, 2016), hal 806

yang membentuk dunia sendiri dan berbeda dengan kelas penguasa. Kelas sosial tersebut menuntut pengakuan sebagai “makhluk berbicara” yang berarti kelas sosial tersebut menggunakan bahasa untuk mengartikulasikan identitas dan tuntutan untuk memiliki hak berbicara dalam kehidupan politik. Refleksi historis ini menjadikan dasar pemikiran estetika politik Rancière yang tidak hanya terjadi melalui hukum atau kebijakan formal. Melainkan terdapat perubahan pengalaman estetika dalam arti luas untuk memahami realitas sosial. Refleksi historis ini juga menunjukkan adanya penentangan tatanan politik sebagai wujud emansipasi¹⁵.

Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji relasi antara emansipasi dan estetika politik dalam pemikiran Jacques Rancière. Karya ilmiah ini bertujuan untuk menelusuri proses genealogi yang membentuk hubungan tersebut. Emansipasi yang dikonstruksikan sebagai tujuan utama dari estetika politik Rancière dalam merespons struktur dan tatanan politik yang hegemonik. Dengan demikian, karya ilmiah ini tidak hanya berupaya mengidentifikasi konsep emansipasi dalam estetika politik Rancière, tetapi juga menganalisis gagasan tersebut yang telah berkembang sebagai suatu mekanisme kritis dalam mendekonstruksi hierarki yang mendasari pengalaman estetis dan politik dalam masyarakat.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini merupakan metode analisis deskriptif. Penulis menggunakan unsur metodis berupa interpretasi, induksi dan deduksi, refleksi dan idealisasi, serta heuristika¹⁶. Pendekatan metode penelitian ini dilakukan untuk menelaah data dari literatur akademik berupa buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan objek formal berupa konsep emansipasi dan objek material berupa estetika politik Jacques Rancière.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Emansipasi Sebagai Proses Kesetaraan

Jacques Rancière merupakan seorang profesor filsafat di Eropa Graduate School (EGS) dan Profesor Emeritus di Universitas de Prancis atau dikenal dengan University of Paris VIII. Dari kedua universitas tersebut, Rancière memberikan pengaruh corak pemikiran progresif dan radikal¹⁷. Corak pemikiran ini didapatkan Rancière dari kritiknya pada pemikiran gurunya Louis Althusser. Kritik Rancière ini menilai teori yang digagas Althusser hanyalah sebuah kenaiifan politik. Selain itu, Rancière juga menganggap Althusser hanya menggunakan sentuhan revolusioner saja dalam kerangka teori ideologi tetapi mengilangkan perjuangan kelas¹⁸.

Kritik Rancière terhadap Althusser turut mempengaruhi sisi lain pemikirannya untuk menggali struktur sosial. Rancière menggunakan pengaruh lain dari pemikiran Michel Foucault tentang emansipasi dan kekuasaan. Pengaruh ini digunakan secara metodologis untuk menemukan struktur sosial yang meresap ke seluruh kehidupan sosial. Rancière justru menemukan bahwasanya keberadaan kekuasaan meresap kepada kehidupan sosial yang menyebar dalam jaringan hubungan sosial, bahasa, dan praktik keseharian¹⁹. Temuan Rancière tentang struktur sosial ini turut mengantarkan juga pada politik dan estetika. Pendekatan Rancière secara metodologis melahirkan pengakuan pada kesamaan pemikirannya dengan

¹⁵ Alison Ross, “*The Aesthetic Fable: Cinema in Jacques Rancière’s “Aesthetic Politics”*”, *Journal Sub Stance*, Vol. 38, No. 1, 2009, hal 131.

¹⁶ Bakker, A dan Zubair, A. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.

¹⁷ Kees Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer: Prancis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal 6

¹⁸ Jacques Rancière, *Althusser’s Lesson Translated by Emiliano Battista*, (London: The Continuum International Publishing Group, 2011), hal 129

¹⁹ Jacques Rancière, *The Politics of Aesthetics The Distribution of the Sensible Translated with an Introduction by Gabriel Rockchill*, (London: The Continuum International Publishing Group, 2004), hal 3-5

Foucault. Persamaan ini berada pada tatanan sosial yang perlu adanya pembongkaran dengan menggali filsafat dan politik untuk menggali kepentingan kekuasaan yang tersembunyi dalam struktur dominasi.

Inspirasi pola metodologis Foucault disisi lain membuat Ranciere membuka dimensi argumentasi pada domain individu dan kelompok. Ranciere menganggap keberadaan individu dan kelompok yang berada pada “tidak memiliki bagian” dalam masyarakat menjadikannya bertindak progresif dalam merebut kembali suara kelas melalui tindakan politik²⁰. Pemikiran Ranciere merujuk pada adanya struktur dominasi masyarakat yang tidak mengakomodasi tatanan sosial yang adil. Pandangan dominasi kekuasaan sebagai sentra tatanan sosial menimbulkan kritik Ranciere terhadap Foucault. Dalam kritiknya, Ranciere tidak setuju dengan adanya pembongkaran mekanisme kekuasaan tanpa memberikan ruang yang cukup bagi subjek politik untuk melakukan perlawanan.

Adanya ketidakadilan dalam struktur tatanan sosial membuat masyarakat yang “tidak memiliki bagian” mengambil langkah emansipasi untuk memperebutkan keadilan. Kebutuhan keadilan masyarakat yang “tidak memiliki bagian” ini Ranciere tuangkan dalam konsep *distribution of the sensible*. Konsep ini menjadi gagasan Ranciere pada dinamika masyarakat yang terorganisir pada aspek perasaan, pemahaman, dan artikulasi pada ruang sosial²¹. Kemudian, pengorganisir ini menjadi tindakan emansipasi sebagai proses kesetaraan atas pembagian struktur. Kebutuhan pembagian struktur masyarakat ini berorientasi pada serangkaian hak di mata publik. Kritik terhadap Foucault ini dimanfaatkan oleh Ranciere untuk menunjukkan corak pemikiran pada pola kekuasaan yang membentuk subjek. Selain itu, Ranciere menemukan subjek dalam kekuasaan ini dapat merebut agensi politik. Kembali merujuk pada pemikiran Foucault, Ranciere menilai logika berpikir Foucault terjebak dalam pandangan subjek merupakan hasil dari kekuasaan. Oleh karena itu, akibat pemikiran ini emansipasi dalam masyarakat tidak dapat berjalan.

Berangkat dari pengaruh pemikiran Althusser dan Foucault, Ranciere menegaskan dasar emansipasi berada pada tatanan sosial yang setara. Pada konteks politik Ranciere memandang masyarakat memiliki hak yang sama sehingga, terdapat penentangan pada status quo dalam kultur politik tertentu²². Ranciere menolak adanya teori yang diharuskan membuktikan kesetaraan. Bagi Ranciere yang terpenting dalam membangun kesetaraan bermula dari tindakan politik yang menjadi proses kesetaraan. Pemikiran Ranciere ini meninjau adanya pandangan masyarakat secara “*demos*”. Pembacaan Ranciere tentang “*demos*” dimaknai sebagai entitas yang memiliki pondasi kokoh secara transendental untuk dijadikan pijakan. Keyakinan Ranciere terhadap “*demos*” perlahan diterjemahkan sebagai hasrat manusia terhadap “sesuatu yang lebih atau kurang dari dalam diri sendiri”. Akibatnya manusia menjadi entitas yang bersifat dinamis dan senantiasa mengalami pergeseran pada pada suatu kesatuan yang tidak stabil. Dampak dari ketidakstabilan “*demos*” berpotensi untuk menjadikan suatu kelas sosial yang sudah ada tergerak untuk melakukan tindakan politik dalam mendefinisikan ulang komunitas politik. Tujuan dari tindakan ini berorientasi pada keinginan untuk kesetaraan dalam pengakuan di mata publik. Keberadaan “*demos*” sendiri tidak bisa tetap tetapi, penuh dengan kedinamisan sebagai proses untuk memunculkan adanya identitas dan hak politik yang layak diperebutkan²³.

Perjuangan emansipasi dalam dunia politik secara tidak langsung menunjukkan adanya

²⁰ Jacques Rancière, *The Politics of Aesthetics The Distribution of the Sensible* Translated with an Introduction by Gabriel Rockhill, (London: The Continuum International Publishing Group, 2004), hal 3-5

²¹ *Ibid*, hal 18

²² Matthew Lampert, “*Jacques Ranciere and The Politics of Theory*”, *Journal Cultural Critique*, Vol 106, 2020, hal 17.

²³ Jeremy Valentine, “*Ranciere and Contemporary Political Problems*”, *Journal Paragraph*, Vol. 28, No. 1, 2005, hal 47.

gangguan tatanan sosial yang telah mapan (*police order*). Gangguan ini perlu dibaca secara luas atas dasar kesetaraan dari realitas politik. Ketika keberadaan *police order* yang telah tetap dan ada dianggap tidak adil. Maka, emansipasi perlu dilakukan untuk penyangkalan terhadap *police order*²⁴. Pandangan ketidakadilan pada *policy order* cenderung terletak pada pembagian tatanan sosial atas siapa yang memiliki hak politik dan siapa yang dikaburkan hak politiknya. Kondisi ini justru menjadi problem politik yang secara tidak langsung menjadikan *policy order* sebagai mekanisme eksklusi dalam menjaga stabilitas sosial.

Pemikiran Ranciere pada sisi lain menggarisbawahi emansipasi yang didefinisikan sebagai tindakan mengganggu tatanan yang menuntut pada penyangkalan tatanan sosial yang tidak memiliki kesetaraan. Ranciere menilai ketidaksetaraan ini menimbulkan ketidakadilan pada kelas sosial yang tidak mendapatkan pengakuan pada tatanan sosial itu sendiri. Ranciere meyakini keberadaan kelas sosial yang ini disebut sebagai "*part which has no part*". Pernyataan ini secara formal menjabarkan fakta bahwasanya, kelas sosial yang tidak diakui dalam bagian bagian politik menuntut hak dengan menciptakan kekacauan terhadap tatanan yang mapan. Adapun landasan keyakinan yang diperjuangkan berada pada politik yang bukan sekedar administrasi konsensus. Melainkan sebuah konflik fundamental antara kelas yang ingin mempertahankan tatanan dan mendapatkan pengakuan²⁵.

Ranciere menganggap kebutuhan emansipasi menjadikan konflik sebagai kewajiban untuk menunjukkan eksistensi dan esensi kelas dalam tatanan sosial. Konflik yang terjadi akibat tindakan politik emansipasi tidak dapat direduksi oleh adanya negosiasi dan kompromi dikarenakan logika "*police order*" menjadi belenggu pada kedua upaya tersebut. Kebutuhan emansipasi sebagai proses kesetaraan Ranciere anggap hanya dapat dirubah dalam politik. Pada domain politik, relasi politik dan kebijakan menjadi sasaran utama untuk menentukan adanya kesetaraan. Kelas yang tidak mendapatkan pengakuan dalam politik mengupayakan untuk merusak sistem kebijakan untuk merubah persepsi dan menciptakan kemungkinan kesetaraan yang luas sebagai pembagian pengalaman secara berkelanjutan²⁶.

Konsep kesetaraan Ranciere dalam menentukan prinsip kesetaraan meletakkan diskursus pada individu manusia untuk menggunakan kemampuan intelektualnya dalam memahami dunia. Ranciere meyakini manusia dapat memiliki dorongan pada kondisi tertentu untuk mengembangkan kecerdasannya dalam tatanan sosial. Emansipasi ini bukanlah sekedar keinginan untuk pembebasan secara sosial dan politik. Melainkan bentuk kesadaran individu akan kesetaraan hidup²⁷. Pemikiran Ranciere dalam politik ini menunjukkan motivasi untuk individu mempengaruhi identitas sosial dalam mengubah pengakuan di ruang sosial. Melalui motivasi kesetaraan politik dijadikan ruang konflik untuk menumbuhkan subjek dan objek baru dalam diskusi publik terkait pembagian ruang sosial dan hak-hak pada setiap kelas. Perjuangan ini menjadikan emansipasi sebagai proses politik kesetaraan untuk membuat invisibilitas politik²⁸.

Pemikiran Ranciere dalam emansipasi sebagai proses kesetaraan menolak adanya kesetaraan yang diberikan oleh negara, institusi, dan otoritas tertentu. Ranciere justru menegaskan kesetaraan yang ada adalah hasil dari asumsi individu dalam bertindak secara politik pada objek praduga. Ranciere juga menyatakan bahwa, individu tidak dapat melakukan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Jeremy Valentine, "*Ranciere and Contemporary Political Problems*", *Journal Paragraph*, Vol. 28, No. 1, 2005, hal 47.

²⁶ Solange Guenoun, James H. Kavanagh, and Roxanne Lapisu, "*Jacques Ranciere: Literature, Politics, Aesthetic: Approaches to Democratic Disagreement*", *Journal SubStance*, Vol. 29, No. 2, 2000, hal 12.

²⁷ Joseph J. Tanke, *Jacques Ranciere: An Introduction* (London: Continuum International Publishing Group, 2011), hal 39.

²⁸ *Ibid.*, hal 26

tindakan untuk mencapai kesetaraan melainkan bertindak atas dasar asumsi untuk tujuan kesetaraan. Pendekatan Ranciere ini menjadikan pergeseran penting dalam gagasan kesetaraan sebagai tujuan untuk menuju kesetaraan dalam titik awal tindakan politik²⁹.

Berkaitan dengan kesetaraan Ranciere meyakini individu sebagai subjek dari emansipasi. Ranciere turut menawarkan konsep kesetaraan aktif yang tidak hanya berbicara tentang kewajiban elite terhadap masyarakat. Melainkan terdapat langsung pada subjek rakyat yang memiliki kuasa ada kemungkinan tindakan. Argumentasi Ranciere ini merujuk pada refleksi *Common Sense* karya Thomas Paine yang diadaptasi dalam menyerukan peran aktif masyarakat dalam merubah keadaan sosial dan politik. Pendekatan Ranciere pada pemikiran emansipasi sebagai proses kesetaraan tidak terfokus pada tuntutan hak maupun tanggung jawab. Ranciere justru menginginkan proses emansipasi untuk pembebasan diri dari struktur sosial yang membatasi partisipasi politik masyarakat³⁰.

Pendekatan emansipasi Ranciere ini memiliki perbedaan dengan teori politik yang menjadi arus utama *status quo* dalam kepentingan kekuasaan. Ranciere justru menginginkan adanya tindakan politik yang menentang tatanan sosial untuk dapat mendistribusikan kepentingan peran sosial dan politik secara hierarkis. Perjuangan emansipasi ini bagi Ranciere penting untuk menentukan subjektivitas kelas sosial dalam jaminan pemberian ruang pada keputusan politik³¹. Pemikiran emansipasi Ranciere sebagai proses kesetaraan turut berdampak pada pengalaman estetika dari individu. Dalam kerangka sosial, pengalaman menjadi perspektif tersendiri dalam membangun interaktif dan subjektif. Ide Ranciere ini menggarisbawahi penolakan secara hierarkis antara mereka yang “mengetahui” dan mereka yang “tidak mengetahui”³². Keberdampakan emansipasi pada estetika ini bukan semata-mata pada seni melainkan cara membangun logika berpikir kelas sosial dalam mendapatkan pengakuan di tatanan sosial. Kebutuhan sosial ini merujuk estetika politik sebagai paradigma berpikir dalam menginterpretasikan keadaan sosial.

Ranciere menyoroti pemikirannya tentang emansipasi berbeda dengan pandangan tradisional selayaknya pendidikan dan pembelajaran. Ranciere justru menegaskan dalam upaya emansipasi terdapat sebuah proses transfer pengetahuan dari yang tahu kepada yang dianggap tidak tahu. Proses ini menciptakan kesetaraan untuk menafsirkan dunia sekitar bagi individu secara mandiri. Pendekatan Ranciere ini diperkuat dengan dijabarkan kesetaraan intelektual pada tesisnya di buku *The Ignorant Schoolmaster* (1987). Ranciere memandang untuk dapat membangun emansipasi dibutuhkan kapasitas kolektif pada kemampuan berpikir, memahami, dan menafsirkan dunia. Ketika ketiga aspek ini telah dibangun dan terintegrasi dengan baik maka, emansipasi dapat digunakan untuk mengacaukan tatanan sosial. Ranciere kembali menegaskan individu dalam membangun pengalaman dan perasaan emansipasi dituntut untuk aktif dalam memberikan beragam makna yang dicapai di dunia. Hal ini dibutuhkan secara keberlanjutan untuk menentukan untuk membentuk tatanan sosial yang setara dengan adanya pengakuan politik³³

Pemikiran Ranciere pada konsep emansipasi merujuk pada kritik tatanan sosial yang hierarkis. Dengan memfokuskan pada pembentukan karakter individu sebagai aktor emansipasi, Ranciere berusaha menggapai segala sektor kehidupan melalui integrasi estetika politik. Ranciere menegaskan emansipasi yang layak didapatkan individu bermula pada pengalaman dan perasaan hidup untuk pengakuan. Hal ini diperjuangkan individu dikarenakan

²⁹ Todd May, *Contemporary Political Movements and the Thought of Jacques Rancière Equality in Action* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010), hal 11.

³⁰ Todd May, *The Political Thought of Jacques Ranciere Creating Equality* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008), hal 67.

³¹ *Ibid.*

³² Jacques Ranciere, *The Emancipated Spectator* Translated by Gregory Elliot (London: Verso, 2009), hal 12.

³³ *Ibid.*, hal 25.

emansipasi hanya dapat dicapai secara individual dengan konsolidasi kolektif. Ranciere meyakini emansipasi tidak mungkin bisa diberikan oleh negara atau institusi dikarenakan logika berpikir yang dibangun individu tidak bisa didapatkan dari luar. Oleh karena itu, Ranciere menjadikan individu sebagai subjek dalam memperjuangkan kebutuhan hak dalam tatanan sosial melalui penggunaan akal budinya³⁴.

Keberadaan emansipasi dalam kelas sosial diperjuangkan bukan merupakan hasil dari pendidikan formal maupun instruksi otoritas. Emansipasi ada di dalam kerangka akal budi kelas sosial dimulai dari proses internal yang didasari oleh seseorang untuk menggunakan kemampuan intelektualitasnya. Pemikiran Ranciere ini merujuk pada kondisi kapasitas intelektual yang setara dengan menempatkan peran individu bukan untuk mencerdaskan orang lain. Melainkan mendorong untuk penggunaan akal yang setara³⁵. Ranciere meyakini akal individu dalam ikatan kelas sosial yang telah terintegrasi maka, akan dapat digunakan untuk menantang pandangan tradisional maupun politik. Emansipasi yang tumbuh dari diri individu ini sering kali dianggap sebagai bentuk pencerahan dari adanya negara atau institusi. Namun, Ranciere menolak dengan menegaskan individu merupakan aktor penumbuhan emansipasi dengan menolak adanya ketergantungan pada otoritas.

3.2 Estetika dan Politik: Pembagian yang dapat dirasakan

Relasi estetika dan politik pada pemikiran Ranciere berada dalam penolakan Ranciere terhadap pandangan tradisional dalam memandang politik sebagai upaya untuk mencapai keteraturan sosial yang harmonis³⁶. Sebaliknya, Ranciere memandang politik merupakan ruang untuk terjadinya momen ketidaksepakatan (*disagreement*) pada kondisi tatanan sosial yang mapan. Ranciere meyakini tatanan sosial yang dianggap mapan ini kedepannya dapat digugat karena tidak adanya ruang pada jaminan hak politik pada kelas sosial tertentu. Esensi politik bukanlah sekedar administrasi atau konsensus. Melainkan pencerahan dan konflik untuk mencapai hierarki sosial pada kesetaraan.

Demi mewujudkan kesetaraan Ranciere mencerminkan gagasannya pada peran aktif individu dalam menonton dan memahami interpretasi keadaan. Cerminan pemikiran Ranciere ini menjadikan individu yang memegang peran aktif dalam menonton bukanlah sebagai entitas pasif. Melainkan individu ini memiliki peran aktif untuk menerima makna dari penciptaan pemahaman pada otoritas tertentu³⁷. Ranciere mengutarakannya pada konteks tatanan estetika di seni yang direproduksi oleh otoritas tertentu dengan makna tertentu. Kebutuhan individu dalam memahami seni ini membuat kemampuan akal budi individu beradaptasi untuk menentukan makna dengan menggunakan kemampuan untuk menafsirkan, menghubungkan, dan membentuk pemahaman sendiri pada objek seni. Logika Ranciere ini menjadikan penonton tidak dianggap sebagai pasif, melainkan penonton yang menjadi aktor emansipasi aktif.

Penonton sebagai emansipasi aktif ini menjadikan adanya kesenjangan makna. Namun, Ranciere menolak adanya kesenjangan ini dikarenakan antara individu yang mengetahui (seniman, kritikus, akademisi) dengan tidak mengetahui (penonton), kedua setara menggunakan kapasitas intelektualnya dalam menciptakan makna sendiri tanpa otoritas³⁸. Berkaca pada kondisi struktur pembagian sosial ini, Ranciere menjadikan

³⁴ Jacques Ranciere, *The Ignorant Schoolmaster Five Lessons in Intellectual Emancipation Translated*, with an Introduction by Kritin Ross (California: Stanford University Press, 1991), hal 106.

³⁵ Jacques Ranciere *The Ignorant Schoolmaster Five Lessons in Intellectual Emancipation Translated*, with an Introduction by Kritin Ross (California: Stanford University Press, 1991), hal 106.

³⁶ Jeremy Valentine, "Ranciere and Contemporary Political Problems", *Journal Paragraph*, Vol. 28, No. 1, 2005, hal 46.

³⁷ Jacques Ranciere, *The Emancipated Spectator Translated* by Gregory Elliot (London: Verso, 2009), hal 34.

³⁸ *Ibid.*

pembagian sebagai estetika yang memiliki artian lebih luas untuk menjadi dasar pengalaman dunia yang terorganisasi secara sosial. Ranciere menegaskan emansipasi yang berdampak pada lahirnya konsep estetika meletakkan ruang dan waktu bukan hanya sebagai kategori pembentuk objek pengetahuan. Melainkan terdapat domain baru pada kategori sosial yang menentukan bagaimana individu dan kelompok diposisikan dalam masyarakat. Pemikiran Ranciere dalam relasi politik dan estetika mengatur adanya pembagian yang jelas berdasarkan pada pengalaman dan hak politik yang didistribusikan. Bagi Ranciere untuk membaca estetika dalam politik, diperlukan pemahaman politik yang didefinisikan sebagai reorganisasi bentuk pengalaman bersama. Definisi ini menjabarkan politik bukan sekedar tentang hukum dan konstitusi. Melainkan politik menjadi tempat untuk individu mana pun dapat diakui di masyarakat melalui partisipasi ruang publik³⁹.

Pemikiran relasi estetika dan politik dalam pemikiran Ranciere bukan lagi persoalan tentang representasi seni atau selera. Melainkan tentang cara kerja dunia sosial dalam mengkonfigurasi individu dapat diakui dalam tatanan sosial pada batasan “umum” dan “pribadi” yang ditentukan. Ranciere juga menekankan politik sejatinya memiliki sifat disruptif yang menjadikan struktur dominan boleh diakui dalam ruang publik untuk pertentangan dan dipertanyakan. Melalui pengalaman estetika, individu yang menjadi bagian dari struktur tidak tinggal diam dalam konsumtif pasif. Individu memiliki peranan yang diharuskan untuk membuka ruang dialog yang bersifat interaktif dan partisipatif untuk. Ranciere memberikan contoh pemikirannya ini sebagai “*the emancipated spectator*” dalam konteks seni. Ranciere menegaskan individu dalam berinteraksi dengan seni bukanlah sebagai penikmat yang hanya menerima seni. Melainkan individu dapat bebas menikmati seni untuk menafsirkan makna sendiri dalam ruang dialog publik⁴⁰.

Berangkat dari rujukan seni, Ranciere memberikan penjelasan bahwasanya seni bukan hanya pengalaman indrawi yang diatur dan distribusikan dalam masyarakat. Perumpamaan seni ini perlu dibagi kerangka berpikirnya pada pembagian indrawi (*distribution on the sensible*) yang meliputi persepsi, visibilitas, dan suara yang didistribusikan pada sesuatu untuk dipahami⁴¹. Pembagian indrawi ini dalam konteks politik Ranciere mainkan untuk mendefinisikan ruang dan waktu agar pengalaman politik dapat menjadi perjuangan emansipasi. Ranciere berusaha untuk mengkonseptualisasikan dimensi estetika politik secara umum. Ranciere merujuk pada landasan historis yang membuat bagaimana pekerja pada abad ke-19 membentuk cara baru untuk memahami dunia melampaui batasan yang ada pada struktur sosial. Rujukan ini menjadikan estetika dalam politik bukan hanya tentang perebutan kekuasaan. Melainkan tentang distribusi individu dan kelompok untuk mengartikulasikan realitas sosial dan menentang tatanan sosial yang dominan⁴².

Relasi estetika dan politik dalam pemikiran Ranciere memiliki keterkaitan pada pergeseran pada cara individu memandang dan mengalami persepsinya tentang dunia. Melalui politik, individu membentuk perjuangan yang bukan hanya mempermasalahkan pada hak dan kebijakan tetapi, terdapat juga konfigurasi ruang dan waktu untuk memungkinkan keterlibatan bentuk baru pada sosial dan politik. Pemikiran Ranciere dalam estetika membentuk adanya pemahaman revolusi atas apa yang dialami oleh individu. Melalui rujukan historis pekerja pada abad ke-19, estetika berusaha untuk melepas adanya selerea yang artistik. Melainkan individu berusaha untuk menjadikannya sebagai upaya transformasi yang begitu luas terkait dengan cara pandang dunia dan sekitar. Revolusi estetika yang bukan hanya soal seni ini menjadikan cerminan kebutuhan individu untuk merubah struktur sosial dan politik. Berkaca pada abad-19, Ranciere menilai pekerja dimasa ini melihat dinamika kehidupannya bukan hanya menjadi bagian produksi. pekerja di masa itu perlu menjadi individu yang merdeka dan memiliki

³⁹ Jacques Ranciere, “*From Politics to Aesthetics ?*”, Journal Paragraph, Vol. 28, No. 1, 2005, hal 14.

⁴⁰ Jacques Ranciere, *The Emancipated Spectator* Translated by Gregory Elliot (London: Verso, 2009), hal 45.

⁴¹ Ranciere, Op Cit. hal 15.

⁴² *Ibid.*

kesadaran emansipasi untuk berkontribusi bertindak pada pembongkaran hierarkis sosial. Oleh karena itu, Ranciere menganggap estetika dalam bukan soal seni yang dangkal dan membelenggu individu untuk memahami dunia yang lebih radikal⁴³.

Pemikiran estetika dan politik Ranciere ini merupakan induk dari pemikiran emansipasi yang berdampak pada lintas kehidupan. Pemikiran ini meyakinkan Ranciere mengkritik logika estetika tradisional. Ranciere tidak sepakat dengan adanya individu yang dijadikan pasif oleh adanya sebuah tatanan struktur sosial. Kondisi individu yang pasif membuat Ranciere menilai individu tersebut akan terbelenggu pada tatanan ketidaksetaraan. Melalui konsep emansipasi Ranciere menjadikan individu untuk perlu menumbuhkan kesadaran dalam meningkatkan kapasitas berpikir dan menafsir realitas sosial tanpa bergantung pada otoritas⁴⁴.

Pemikiran estetika dalam politik Ranciere memiliki rujukan lain pada penolakan konsep estetika Pierre Bourdieu yang menjadi alat diferensiasi sosial. Penolakan Ranciere ini menggaris bawahi pada preferensi estetika sangat ditentukan oleh posisi sosial. Kritik Ranciere terhadap Bourdieu dipertegas dengan membuktikan bahwasanya, kelas dominan memiliki preferensi estetika tersendiri untuk mempertahankan hegemoni dalam sebuah sistem tatanan sosial. Kritik Ranciere terhadap Bourdieu menjadikan individu menggunakan preferensi estetika hanya sebatas identifikasi sosial. Ranciere menolak konsep Bourdieu tersebut dengan menekankan preferensi estetika pada kelas sosial perlu adanya keterhubungan antara aspek sosial, estetika, dan politik sehingga, estetika dapat dialektis untuk tujuan emansipasi. Menurut Ranciere, pengalaman individu dalam kelas tidak harus membuatnya tunduk pada dominasi estetika yang telah ada. Keberadaan individu dalam tatanan sosial perlu adanya emansipasi tersendiri untuk mengklaim pengakuan pada publik. Pendekatan Ranciere dalam kritik Bourdieu ini menjadikan individu mengalami pembagian yang dapat dirasakan (*le partage du sensible*)⁴⁵.

Dinamika politik yang dinamis menjadi tantangan tersendiri dari estetika. Ranciere meyakini estetika politik ini mempersoalkan tentang konflik fundamental mengenai keberadaan pengakuan dan ruang konfigurasi publik. Keyakinan Ranciere ini menjadikan politik sebagai “panggung bersama” untuk menjadikan tempat kebutuhan pengakuan bagi siapa pun yang bertindak dalam kepentingan politik⁴⁶. Namun, terkadang realitas politik tidak dapat mengakomodasi pengakuan bersama dalam panggung. Akibatnya kelas-kelas yang tidak sejalan dengan tatanan sosial akan diabaikan, disingkirkan dan dianggap seolah-olah tidak ada. Realitas ini menjadikan makna “panggung bersama” menjadi tidak ada. Ranciere mengkritik keadaan tersebut dengan memberikan fakta bahwa, kelas yang tidak dianggap bukan berarti sebagai subjek politik yang tidak sah. Kelas yang tidak dianggap dalam tatanan sosial masih tetap memiliki hak yang setara pada kelas-kelas yang mendominasi sistem. “panggung politik” ini membuat Ranciere menggagas politik menjadi ruang konflik estetika. Kebutuhan kelas yang tidak diakui ini menumbuhkan semangat emansipasi dengan paradigma relasi politik antara “ditampilkan” atau “disembunyikan. Perjuangan politik ini menjadikan kekuasaan dapat memperhitungkan keberadaan kelas sosial yang termarginalisasikan akibat tatanan sosial yang dominan.

Kembali pada pemikiran estetika yang menjadi pembagian yang dapat dirasakan (*le partage du sensible*). Ranciere menemukan adanya konstelasi terkait dengan alasan estetika tidak hanya berbicara soal seni. Ranciere membuktikan bahwasanya, seni yang ada dalam masyarakat hanya akan memberikan makna-makna yang sudah mapan dalam tatanan sosial.

⁴³ *Ibid*, hal 15-16

⁴⁴ Jacques Ranciere, *The Emancipated Spectator* Translated by Gregory Elliot (London: Verso, 2009), hal 58.

⁴⁵ Jacques Ranciere, “*From Politics to Aesthetics ?*”, *Journal Paragraph*, Vol. 28, No. 1, 2005, hal 16.

⁴⁶ Alison Ross, “*The Aesthetic Fable: Cinema in Jacques Ranciere’s “Aesthetic Politics”*”, *Journal SubStance*, Vol. 38, No. 1, 2009, hal 128.

Anggapan ini menjadikan konstelasi makna pada terdisinorporasi (makna yang tidak melekat pada otoritas tatanan sosial dan politik). Akibatnya seni direproduksi sebagai ruang baru untuk pemikiran politik. Selain ini seni yang ada dalam tatanan sosial hanya merepresentasikan realitas politik yang berkepentingan pada cara membentuk dan mengubah masyarakat memahami politik⁴⁷.

Ranciere berusaha melepas estetika yang hanya mempersoalkan seni melalui redistribusi pola-pola makna yang dapat dirasakan sebagai inti dari politik. Politik pada pandangan bukan hanya pada pertarungan kepentingan dan hukum tetapi, pengakuan atas hak pada tatanan sosial yang dinamis. Kebutuhan individu pada perasaan dalam kontribusi membuat pendistribusi kelas dalam masyarakat perlu di pertarungan dengan tujuan pengakuan secara politik⁴⁸

Pemikiran Ranciere pada pembagian yang dapat dirasakan (*le partage du sensible*) bukan untuk menjelaskan makna dari keindahan. Justru mengantarkan pada pemahaman estetika yang diorganisasi dalam emansipasi untuk kepentingan konsekuensi politik. Penggunaan estetika yang semula menjadi gangguan hierarkis sosial membuka adanya preferensi baru dalam politik⁴⁹. Kebutuhan individu pada preferensi baru digagas Ranciere dalam redistribusi pengalaman yang memandang estetika selalu memiliki dimensi politis untuk menentukan batas pengalaman dan partisipasi kelas. Pemikiran Ranciere ini mengindikasikan pengalaman individu dan kelas sosial tidak berdiri sendiri. Melainkan memiliki ketergantungan pada kondisi sosial dan politik. Pendekatan Ranciere dalam memahami estetika politik ini membentuk dan menata tatanan sosial yang tidak terbatas hanya ekspresi artistik. Ranciere justru kembali membanggakan revolusi estetikanya sebagai wacana politik baru dalam mengintervensi tatanan sosial⁵⁰.

Relasi estetika dan politik pada sistem politik demokrasi turut mendapatkan perhatian dari Ranciere. Keberadaan demokrasi yang sejatinya menjamin kebebasan kelas dalam memperjuangkan hak dalam politik justru berhadapan pada demokrasi yang hierarkis. Ranciere mengkritik sistem demokrasi tersebut dengan menegaskan tesis pembanding berupa “demokrasi tanpa dasar hierarkis”. Kondisi ini membuat Ranciere menolak pada sistem demokrasi yang menjadikan politik sebagai urusan teknokratik. Ranciere justru menegaskan pentingnya estetika membentuk subjektivitas politik⁵¹. Merujuk pada kebutuhan pembagian yang dapat dirasakan (*le partage du sensible*), subjektivitas politik ini mengkritik konsensus politik yang mapan. Demokrasi selalu menjelas kelas pada sistem pemerintahan konsensus justru menghilangkan konflik dan perdebatan yang seharusnya menjadi esensi politik. Ranciere menekankan ketidaksepakatan fundamental justru membuka ruang bagi politik sebagai perjuangan untuk kesetaraan⁵².

Perdebatan dan ketegangan politik bukanlah sesuatu yang seharusnya dipahami sebagai situasi yang mapan. Ranciere justru memandangnya sebagai dinamika politik pada batas-batas perbedaan dan ketidaksepakatan. Adanya subjektivitas politik ditekankan oleh Ranciere tidak berada pada identitas tetap, tetapi ada dalam keterlibatan kontradiksi. Argumentasi Ranciere ini justru mengartikan bahwa, tindakan politik sejatinya terjadi ketika ada gesekan antara kelas

⁴⁷ *Ibid*, hal 130-131.

⁴⁸ Alison Ross, “*The Aesthetic Fable: Cinema in Jacques Ranciere’s “Aesthetic Politics”*”, *Journal SubStance*, Vol. 38, No. 1, 2009, hal 130-131.

⁴⁹ Jacques Ranciere, “*The Aesthetic Dimension: Aesthetics, politics, Knowledge*”, *Journal Critical Inquiry*, Vol. 36, No. 1, 2009, hal 2.

⁵⁰ Gavin Arnall, Laura Gandolfi, dan Enea Zaramella “*Aesthetics and Politics Revisited: An Interview with Jacques Ranciere*”, *Journal Critical Inquiry*, Vol. 38, No. 2, 2012, hal 290.

⁵¹ Ranciere, *Op Cit*, hal 10.

⁵² Joseph J. Tanke, *Jacques Ranciere: An Introduction* (London: Continuum International Publishing Group, 2011), hal 26.

atau pun struktur sosial yang berbeda. Pandangan ini menjadikan politik bukan sekedar manajemen konsensus secara dangkal. Melainkan politik justru menjadi bentuk tindakan paradoksal yang mengganggu tatanan yang ada⁵³.

Pemikiran estetika dan politik Ranciere memiliki akar pada politik yang setainya bukan sekedar administrasi negara atau distribusi kekuasaan. Melainkan pembentukan proses emansipasi pada keidentitasan yang ditetapkan⁵⁴. Kondisi ini membuat kelas harus mereproduksi pemahaman realitas sosial yang dapat dipahami dan dirasakan dalam suatu komunitas. Pemikiran Ranciere pada tatanan sosial yang ada menetapkan “siapa yang memiliki hak” dan “siapa yang tidak relevan” hanya menjadi sesuatu “kebisingan” tanpa makna. Selain itu, Ranciere menjelaskan bahwa, politik dalam masyarakat secara diam diam menetapkan batasan untuk memahami realitas. Politik sejatinya tidak diharuskan berada dalam batasan baik secara formal (parlemen dan pemilu) dan informal (preferensi). Politik justru menjadikan momen kelas-kelas yang menjadi korban terfasilitasi dengan emansipasi yang diakhiri pada tercapainya hak politik kelas tersebut.

Pemahaman kesetaraan dalam emansipasi itu sendiri tidak memiliki adanya hierarkis yang mendasar diantara manusia. Ranciere menegaskan kapasitas intelektual justru menjadi kehendak individu untuk menentukan ide-ide emansipasi. Diskursus emansipasi sebagai proses kesetaraan dalam estetika politik bukan menjadikan individu mengalami “pencerdasan”. Justru Individu memiliki dasar kesadaran pada kesetaraan fundamental pada kapasitas berpikir⁵⁵. Penggunaan kapasitas intelektual individu menjadikan individu mengamati politik sebagai dissensus sebelum menentukan tindakan emansipasi. Kapasitas intelektual ini justru membuka kerangka berpikir bahwasanya, politik bukan untuk mencapai kesepakatan (*konsensus*) tetapi, mengungkap ketidaksepakatan (*dissensus*). Kebutuhan preferensi individu dalam emansipasi cenderung menginginkan membuka ketidaksepakatan secara alami. Selain itu, individu akan membawa kelas yang berada pada ketidakjelasan hak dalam politik menuntut adanya pengakuan untuk meredefinisi batasan politik itu sendiri⁵⁶.

Implikasi pemikiran Ranciere merujuk pada kondisi politik dan estetika sebagai ketidaksepakatan dalam tatanan yang mapan. Kembali meninjau seni akan menemukan dimensi dissensus yang dapat memainkan peran penting dalam mengguncang persepsi untuk menemukan peluang baru melihat dunia⁵⁷. Selain itu, Ranciere juga menjadikan seni estetis sebagai bentuk dissensus karena dapat mengacaukan hubungan yang telah ditetapkan antara pengalaman, persepsi, dan makna. Kondisi ini perlu menjadi perhatian estetika untuk mendistribusikan dalam menentukan “yang dapat dilihat” dan “yang dapat dirasakan” untuk menjadi gangguan tatanan. Seni estetis tidak hanya menggoyahkan hierarki dalam rezim representasi, tetapi juga merombak adanya asosiasi makna. Demi melengkapi pemikiran estetika, Ranciere menghubungkan seni dan politik untuk mendefinisikan dissensus sebagai konfigurasi pengalaman estetis. Ranciere juga mewanti-wanti dikala estetika dan politik menyatu maka, dibutuhkan batasan bagi individu untuk dapat menafsirkan makna dalam konfigurasi tatanan⁵⁸.

⁵³ Nick Hewlett, Badiou, Balibar, Ranciere Re-Thinking Emancipation (London: Continuum International Publishing Group, 2010), hal 100.

⁵⁴ Tanke, *Loc Cit.*

⁵⁵ Joseph J. Tanke, Jacques Ranciere: An Introduction (London: Continuum International Publishing Group, 2011), hal 39.

⁵⁶ *Ibid*, hal 62.

⁵⁷ *Ibid*, hal 85

⁵⁸ Jacques Ranciere, Dissensus On Politics and Aesthetics Translated by Steven Corroran (New York: Continuum International Publishing Group, 2010), hal 142.

3.3 Seni Sebagai Ruang Politik Emansipatoris

Diskursus emansipasi Ranciere dalam membentuk genealogi pemikiran menjalani proses logika berpikir dengan menjadikan estetika sebagai paradigma seni dan diluar dari seni. Kondisi ini dijelaskan Ranciere dalam kepentingan untuk menciptakan sebuah ruang dan mendapatkan kembali kehidupan. Argumentasi Ranciere ini dinilai sebagai kritik atas adanya struktur sosial yang menjadikan estetika secara tersentral dan terkontrol. Ranciere menolak realitas tersebut dengan menjadikan emansipasi sebagai upaya untuk menjadikan seni lepas dari struktur dan dapat mereformasi nilai-nilai estetika. Pemikiran Ranciere ini mencerminkan kondisi seni yang seharusnya tidak lagi terikat oleh aturan representasi tetapi, diupayakan dapat membuat potensi dalam mendeskripsikan dunia⁵⁹.

Ranciere berusaha menjadikan seni sebagai ruang untuk menjadikan emansipasi tumbuh dan melepas struktur tatanan yang mapan. Ranciere berpendapat bahwasanya, untuk dapat menjalankan emansipasi individu maupun kelas membutuhkan adanya pembagian yang dapat dirasakan (*le partage du sensible*) sebagai dasar kesadaran. Kemudian, dengan pengalaman yang didapatkan seni dipergunakan dalam ruang politik untuk membongkar struktur dan pemahaman. Ranciere juga menilai kondisi seni yang telah melebur dalam politik tidak muncul dan ada secara netral dan objektif. Realita ini menjadikan emansipasi beriringan dengan estetika dipahami untuk menjadi alat representasi baru⁶⁰.

Kebutuhan individu pada emansipasi menjadi seni sebagai ruang politik dijalankan secara dissensus⁶¹. Bagi Ranciere, individu maupun kelas akan menjadikan seni sebagai gangguan tatanan simbolik untuk memecah adanya paradigma estetika yang tersentral dan tidak membuka kemungkinan dialektika. Kemudian, realita ini meredistribusi sensori dengan mengimplikasikan kebutuhan politik pada tindakan-tindakan konkrit. Selain itu, seni yang telah menjadi ruang politik dalam perjuangan emansipasi akan memberikan jaminan adanya perhatian publik dan tempat pengakuan secara berkelanjutan.

Ranciere disisi lain berusaha untuk menjadikan estetika dengan lebih modern yang bukan hanya menjadikan pemisahan seni secara absolut. Melainkan membuka dimensi ketegangan antara otonomi dan heteronomi seni. Ranciere menunjukkan bahwa secara modernisme seni memiliki relasi dengan politik untuk mempertegas pengalaman yang dapat dirasakan (*le partage du sensible*). Oleh karena itu, pada diskursus estetika modern Ranciere menjadikan seni sebagai ruang politik untuk memuat adanya dialektika dan keterlibatan kelas dalam struktur sosial⁶².

Pemikiran estetika Ranciere menunjukkan relasi seni dan politik memiliki kapasitas untuk menanggukhkan aturan untuk membangun makna yang diinginkan dalam perjuangan emansipasi. Selain itu, Ranciere membuktikan ketika estetika dan politik menembus batas mapan maka, dibutuhkan ruang baru sebagai "lompatan inovatif" dalam perjuangan emansipasi⁶³. Ranciere berpendapat perjuangan individu atau pun kelas menjadikan estetika sebagai sistem berpikir melawan adanya representasi tradisional pada relasi seni dan politik. Dalam diskursus estetika modern, kondisi seni sudah tidak lagi memiliki fungsi pada representasi dunia. Justru seni menjadi ruang pergeseran persepsi dan pengalaman baru. Berkaitan dengan politik, seni menjadi ruang politik emansipasi yang menolak adanya pengelolaan kekuasaan. Seni sebagai ruang politik justru harus diperdebatkan untuk menentukan batas-batas pengalaman yang dapat direstrukturisasi. Oleh karena itu, estetika

⁵⁹ Tanke, *Op Cit*, hal 84

⁶⁰ Jacques Ranciere, "From Politics to Aesthetics ?", *Journal Paragraph*, Vol. 28, No. 1, 2005, hal 17.

⁶¹ Joseph J. Tanke, Jacques Ranciere: An Introduction (London: Continuum International Publishing Group, 2011), hal 84.

⁶² Ranciere, *Op Cit*, hal 21

⁶³ Arne De Boever, "Aesthetic and Political Exceptionalism" dalam *Against Aesthetic Exceptionalism* (Minnesota: University of Minnesota Press, 1994), hal 11.

dipikirkan Ranciere lepas dari seni dan menjadi dialektika mengubah hubungan sosial dan persepsi kolektif⁶⁴.

Ranciere memberikan contoh secara spesifik pada objek puisi, musik, dan fiksi yang menjadi media perjuangan pada ruang politik. Pada objek puisi Ranciere berpendapat terdapat realitas perjalanan yang mendistribusikan persepsi dalam konsekuensi politik. Keberadaan puisi bukan sekedar otonomi yang terpisah dari politik. Ranciere menganggap puisi menjadi dunia tersendiri untuk membebaskan realita dan menciptakan realita yang sesungguhnya. Kondisi ini bukan untuk membuat puisi terisolasi dari dunia sosial. Melainkan bentuk reorganisasi pengalaman dalam memberikan dampak pada tindakan politik⁶⁵. Kemudian, Ranciere menjadikan musik sebagai alat emansipasi dengan memahaminya secara mendalam. Musik yang kenyataannya menjadi medium ekspresi artistik merupakan hasil dari representasi politik. Ranciere menganggap musik dalam memahaminya harus dikaji secara radikal untuk dapat menentukan dimensi politis yang kuat dalam membangun identitas kolektif dalam mobilisasi kekuatan⁶⁶. Ranciere menganggap musik selayaknya agama yang mengandung makna sakral dalam menciptakan kesadaran kolektif. Pemikiran Ranciere ini mengingatkan adanya konsep musik sebagai ekspresi jiwa sebuah bangsa pada tradisi romantisme.

Penggunaan seni sebagai ruang politik menunjukkan fungsi alat sesungguhnya. Dalam kehidupan sosial dan politik, seni bukan hanya menjadi kebutuhan pokok yang terpisah. Melainkan seni memiliki dimensi kenikmatan individu atau pun kelas dalam pengalaman transendental. Demi menciptakan kekacauan dalam sistem tatanan sosial yang tidak memfasilitasi hak, musik menjadi jembatan untuk menyuarakan kehadiran dalam satu kesatuan identitas. Realitas ini menjadikan musik menyatu pada aspek budaya dan politik dalam kesatuan holistik⁶⁷.

Pada konteks fiksi, Ranciere memandang status fiksi mencerminkan adanya tatanan sosial dan politik suatu komunitas. Fiksi menjadi alat emansipasi yang dapat menentukan logika intervensi komunitas untuk mengorganisir diri sendiri dalam menciptakan kekacauan. Realitas tidak adanya jaminan hak pada tatanan sosial membuat fiksi aktif untuk “melihat”, “membayangkan”, “memahami” realitas dunia. Dengan kata lain, fiksi tidak hanya sebagai “cerita yang dibuat-buat”. Melainkan sebuah struktur pengalaman bersama yang menjadi identitas komunitas⁶⁸. Fiksi yang menjadi alat emansipasi menjadikan estetika politik dalam penciptaan realitas ulang yang imajiner. Selain itu, fiksi yang digunakan dengan baik pada ruang politik akan dapat mengubah representasi sensorik dan membangun hubungan realitas dan tindakan politik⁶⁹.

Penjabaran contoh dari Ranciere cukup menunjukkan bukti seni sesungguhnya adalah alat emansipasi pada perjuangan politik. Relasi seni dan politik ini terdapat pola pendefinisian ulang dalam bentuk dissensus⁷⁰. Dengan kata lain seni dan politik menghimpun perasaan kesadaran bersama untuk menentukan kebutuhan hak. Realitas seni yang mudah melebur dalam estetika politik ini menjadi seni sebagai sarana praktik dan visibilitas untuk merekonfigurasi tatanan dan pengalaman sensorik. Ranciere juga menjelaskan seni sebagai alat emansipasi ini

⁶⁴ Solange Guenoun, James H. Kavanagh, dan Roxanne Lapidus, “Jacques Ranciere: Literature, Politics, Aesthetics: Approaches to Democratic Disagreement”, *Journal SubStance*, Vol. 29, No. 2, 2000, hal 12.

⁶⁵ Jacques Ranciere, *Mallarmé The Politics of the Siren* (London: Continuum International Publishing Group, 2011), hal 27.

⁶⁶ Jacques Ranciere, *Mallarmé The Politics of the Siren* (London: Continuum International Publishing Group, 2011), hal 40.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, hal 41.

⁶⁹ Jacques Ranciere, *Dissensus On Politics and Aesthetics Translated by Steven Corcoran* (London: Continuum International Publishing Group, 2010), hal 144.

⁷⁰ *Ibid.*, hal 142

dikarenakan tatanan yang sudah ada memiliki rezim estetika tersendiri. Demi memperjuangkan hak, tindakan politik berupa penentangan rezim estetika dilakukan individu atau pun kelas dengan mereproduksi estetika tersendiri. Individu atau pun kelas akan menggunakan subjektivitas politik untuk memberikan pandangan kesetaraan yang selayaknya terjadi. Dengan demikian, rezim estetika akan mengalami proses dialektika dan menjadi inklusi dalam mempertimbangkan tatanan sosial⁷¹.

IV. SIMPULAN

Konsep emansipasi Ranciere menjadi bukti adanya kebutuhan kesetaraan individu dan kelas dalam tatanan sosial. Melalui reproduksi kesadaran, individu dan kelas melakukan tindakan politik dengan adanya kekacauan untuk merubah adanya sistem yang telah mapan. Selain itu, konsep emansipasi ini memberikan pembaharuan pada estetika politik. Pembaharuan ini menjadikan estetika bukan hanya sekedar diskursus pada seni. Melainkan terdapat juga pengalaman individu dan kelas yang menjadi perjuangan emansipasi dalam ruang politik. Dengan demikian, konsep emansipasi menjadi motor utama atas adanya upaya memperoleh hak kesetaraan pada tatanan sosial di ruang politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnall, G., Gandolfi, L., & Zaramella, E. (2012). Aesthetics and Politics Revisited: An Interview with Jacques Ranciere. *Journal Critical Inquiry*, Vol. 38 No. 2, 289–297. <https://doi.org/10.1086/662743>
- Bakker, A dan Zubair, A. (1990). Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta: Kanisius.
- Bertens, K. (2006). *Filsafat Barat Kontemporer: Prancis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Boever, A. D. (1994). Aesthetic and Political Exceptionalism. In *Against Aesthetic Exceptionalism*. Minnesota: University of Minnesota. <https://doi.org/10.5749/j.ctvm202pr>
- Guenoun, S., Kavanagh, J. H., & Lapisu, R. (2000). Jacques Ranciere: Literature, Politics, Aesthetic: Approaches to Democratic Disagreement. *Journal SubStance*, Vol. 29 No. 2, 3–24. <https://doi.org/10.2307/3685772>
- Hambali, A., & Hidayat, R. (2020). Konsep Pedagogi “Emansipasif Menurut Jacques Ranciere.” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol 5 No. 1, 1–9.
- Hewlett, N. (2010). *Badiou, Balibar, Ranciere Re-Thinking Emancipation*. London: Continuum International Publishing Group. <https://doi.org/10.1057/cpt.2010.9>
- Lampert, M. (2020). Jacques Ranciere and The Politics of Theory. *Journal Cultural Critique*, Vol 106, 1–26. <https://doi.org/10.5749/culturalcritique.106.2020.0001>
- May, T. (2008). *The Political Thought of Jacques Ranciere Creating Equality*. Edinburgh: Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.1515/9780748635337>
- May, T. (2010). *Contemporary Political Movements and the Thought of Jacques Rancière Equality in Action*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Ranciere, J. (1991). *The Ignorant Schoolmaster Five Lessons in Intellectual Emancipation Translated, with an Introduction by Kritin Ross*. California: Stanford University Press.
- Ranciere, J. (2004). *The Politics of Aesthetics The Distribution of the Sensible Translated with an Introduction by Gabriel Rockchill*. London: The Continuum International Publishing Group.
- Ranciere, J. (2007). *On The Shores of Politics Translated Liz Heron*. London: Verso.
- Ranciere, J. (2009a). From Politics to Aesthetics? *Journal Paragraph*, Vol. 28 No, 1, 13–25.
- Ranciere, J. (2009b). The Aesthetic Dimension: Aesthetics, Politics, Knowledge. *Journal Critical Inquiry*, Vol. 36 No. 1, 1–19. <https://doi.org/10.1086/606120>

⁷¹ Gavin Arnall, Laura Gandolfi, dan Enea Zaramella “Aesthetics and Politics Revisited: An Interview with Jacques Ranciere”, *Journal Critical Inquiry*, Vol. 38, No. 2, 2012, hal 295.

- Ranciere, J. (2009c). *The Emancipated Spectator Translated by Gregory Elliot*. Verso.
- Ranciere, J. (2010). *Dissensus On Politics and Aesthetics Translated by Steven Corroran*. New York: Continuum International Publishing Group.
- Ranciere, J. (2011a). *Althusser's Lesson Translated by Emiliano Battista*. London: Continuum International Publishing Group.
- Ranciere, J. (2011b). *MallarMe The Politics of the Siren*. London: Continuum International Publishing Group.
- Ross, A. (2009). The Aesthetic Fable: Cinema in Jacques Ranciere's "Aesthetic Politics." *Journal Sub Stance*, Vol. 28 No. 1, 128-150.
- Suryajaya, M. (2016). *Sejarah Estetika: Era Klasik Sampai Kontemporer*. Jakarta: Gang Kabel.
- Tanke, J. J. (2011). *Jacques Ranciere: An Introduction*. London: The Continuum International Publishing Group.
- Valentine, J. (2005). Ranciere and Contemporary Political Problems. *Journal Paragraph*, Vol. 28 No. 1, 46-60.